

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI,  
*Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat  
Perkosaan*, Jakarta, 2004.

Dikutip dari Abd. Wahid, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan  
Aborsi Akibat Perkosaan: Modus-Modus Kejahatan modern*,  
Op., Cit.

Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasila,  
Yogyakarta.

CB. KUSMARYANTO, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Sri siswanti, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Anita L. Allen, "Legal and Regulatory Issues" dalam W. Th. Reich (ed),  
*Encyclopedia of Bioethics*, Rivised Edition, Volume 1, New  
York: Simon & Schuster, 1995.

Muhajir M. Darwin, *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*,  
Yogyakarta, Media Wacana, 2005.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,  
1986.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bin  
Ilmu, Surabaya, 1987.

### JURNAL

Paulinus Soge, *Tren Aborsi Menuju Legalisasi Hukum*, Jurnal Hukum, 5  
februari 2014. Diakses pada tanggal 13 september 2014.

Paulina Soge, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16, Oktober 2009.

### **SITUS INTERNET**

<http://www.dakta.com/2014/08/pp-nomor-61-tahun-2014-yang-menuai-kontroversi/>, diakses pada tanggal 16 September 2014.

[www.lusa.web.id/diagnosis-kehamilan/](http://www.lusa.web.id/diagnosis-kehamilan/), diakses pada tanggal 3 Desember 2014 pukul 16.10 WIB.

[www.sulut.kemenag.go.id](http://www.sulut.kemenag.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2015.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Konvensi Hak-Hak Anak.